

DAMPAK BURUK PEMBANGUNAN TANPA PEMERATAAN : KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH DI INDONESIA

Reika Happy Sugiastuti¹, Muhammad Rizki Pratama²

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia¹

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia²

Email: reikahappy.s@ub.ac.id, Tel: +62 82242419817 ¹

pratamarizkim@ub.ac.id, Tel: +62 8233873645²

ABSTRACT

This study aims to examine more deeply how the negative impacts of development without equity in Indonesia. This study uses a literature study method that uses various library sources to find out data and information related to the adverse effects of economic disparities between regions in Indonesia due to uneven development. The results of the study show that economic disparities between regions are a bad impact on economic development which only focuses on economic growth. The government must think long and strategically in dealing with the problem of inequality because it involves structural aspects so that it is not easy to change. Recommendations that can be made are that there must be a new program or master plan to support or develop a pattern of development in Indonesia. The new master plan must contain economic development in Indonesia, especially careful planning about an inclusive economy that is able to equalize income. In addition, to ensure the sustainability of the community with a healthy and quality economy, it is necessary to pay attention to non-economic factors which in this case are quality and equitable public services, especially basic services such as education and health. The two recommendations must be realized through a new program and are a good idea.

Keywords: *Economic Development, Economic Gap, Economic Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana dampak buruk pembangunan tanpa pemerataan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literature yang menggunakan berbagai sumber pustaka untuk mengetahui data dan informasi yang berkaitan dengan dampak buruk kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia karena Pembangunan yang tidak merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan dampak buruk dalam pembangunan ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus berfikir panjang dan strategis dalam menghadapi masalah kesenjangan karena telah menyangkut aspek struktural sehingga tidaklah mudah untuk dirubah. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah harus ada program ataupun *masterplan* baru untuk mendukung atau mengembangkan pola pembangunan di Indonesia. *Masterplan* yang baru harus berisi tentang pembangunan ekonomi di Indonesia terutama perencanaan yang matang tentang ekonomi yang inklusif yang mampu pemeratakan pendapatan. Selain itu untuk menjamin keberlangsungan masyarakat dengan ekonomi yang sehat dan berkualitas maka perlu memperhatikan faktor non-ekonomi yang dalam hal ini adalah pelayanan publik yang berkualitas dan merata terutama pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dua rekomendasi tersebut harus diwujudkan melalui program baru dan merupakan ide yang bagus.

Kata kunci: *Pembangunan Ekonomi, Kesenjangan Ekonomi, Kebijakan Ekonomi*

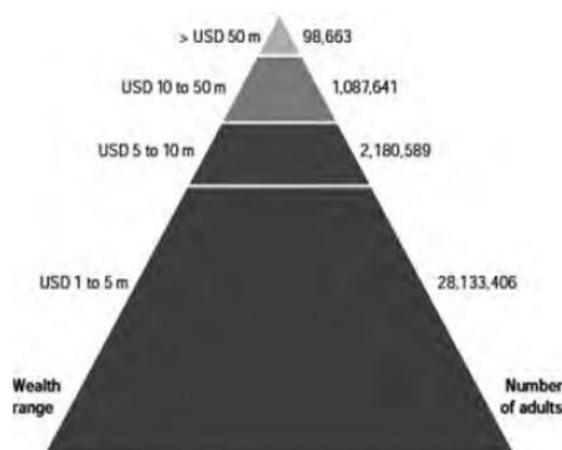
PENDAHULUAN

Proses pembangunan pada suatu Negara dimanapun hendaknya harus selaras dengan meningkatnya kesejahteraan, terutama peningkatan pada sektor ekonomi yang dianggap sebagai roda penggerak utama yang berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Harapan dari kegiatan ini terciptanya kesejahteraan dengan pemerataan yang baik. Namun pada perjalanan pembangunan ekonomi ada kesan bahwa teori-teori ekonomi pada dasarnya memusatkan perhatiannya pada soal bagaimana mencapai kemakmuran melalui proses akumulasi kapital (Rahardjo, 1983). Hal tersebut tidaklah salah ketika pandangan klasik sangat mendominasi ekonomi Dunia hingga saat akan tetapi hasil yang diharapkan tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan dunia, banyak hal akibat terlalu berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kapital berdampak buruk, pada abad ini yang lebih dikenal dengan abad kesenjangan yang terus menunjukkan lebarnya jurang perbedaan ekonomi pada segala sektor. Dan fenomena yang terjadi di dunia pada beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tersebut tak selamanya selaras dengan kesejahteraan masyarakat. Adanya liberalisme ekonomi yang lebih kita kenal dengan wujud pasar bebas, selama ini dianggap model terbaik untuk menuju kesejahteraan bersama, namun nyatanya dinilai telah gagal dan justru menimbulkan kemiskinan. Menurut Piketty (2014), pertumbuhan ekonomi tidak selaras dengan kepuasan demokrasi dan harapan meritokrasi, yang mengharuskan Lembaga spesifik dengan tujuan dan tidak mengandalkan satu-satunya harapan pada pasar atau perkembangan teknologi. Dengan demikian secara sederhana menyatakan apabila fokusnya hanya berbicara tentang pertumbuhan saja maka akan ada kelompok yang kecewa sementara itu pada kelompok lain akan mendapatkan manfaat yang lebih, hal inilah yang disebut dengan ketimpangan.

Menurut Stiglitz (2002), seorang pakar ekonomi publik memberikan banyak sekali penjelasan yang terang bawah keberadaan globalisasi hanyalah sebuah kebohongan semata dengan bukti para antek lembaga keuangan internasional seperti *World Bank* dan IMF ternyata menghancurkan tatanan ekonomi suatu Negara. Krisis global yang terjadi ditahun 1998 adalah salah satu bukti bahwa

resep-resep liberalisasi, stabilisasi dan privatisasi telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian nasional di Negara berkembang yang hingga kini banyak dihinggap masalah kemiskinan yang tak kunjung dapat diminimalisir. Ditambah lagi dengan analisis terbaru oleh Thomas Piketty seorang ekonom asal Perancis yang menyusun peta kesenjangan ekonomi di Dunia melalui bukunya *The Capital in 21 Century* telah menunjukkan fakta lengkap bahwa kesenjangan ekonomi di dunia semakin buruk akibat ketidakadilan ekonomi serta tidak meratanya distribusi pendapatan di dunia, hanya segelintir individu yang mendapatkan manfaat dari kapitalisme

Grafik 1.1 Piramida Kemakmuran Ekonomi



Sumber : Michael Roberts Dalam Pontoh, (2014)

Sementara itu analisis dari Michael Roberts yang mendukung data dari Global Wealth Report 2014 yang menunjukkan bahwa setengah terbawah dari populasi dunia secara kolektif hanya memiliki 1 persen dari kekayaan global, sementara 10 persen penduduk dewasa terkaya menguasai 87 persen kekayaan dan top 1 persen menguasai hampir setengah dari kekayaan global seperti yang terlihat pada grafik 1.1. Hal ini memperkuat fakta bahwa kenikmatan pembangunan dunia melalui akumulasi kapital hanya didapatkan oleh Sebagian kecil dari besarnya populasi yang ada akibatnya jelas yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

LITERATURE REVIEW

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara

berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Menurut Sukirno (2002) yang dinamakan dengan Pertumbuhan Ekonomi berarti meliputi tentang perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Pendapat lain disampaikan oleh Jhingan (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu kenaikan secara jangka panjang dan dinilai sebagai kemampuan suatu negara (daerah) dalam menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya, dan ada kemampuan tumbuh yang selaras dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenaikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik.

Kesenjangan Ekonomi

Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Pendapat lain dari Baldwin (1986) jika kita membahas tentang kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan berarti terjadi selisih atau perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Selanjutnya pada kondisi ketimpangan distribusi pendapatan bisa terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara

berkembang (Jhingan, 2007). Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012). Kuznet (1955) menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya pemerataan pendapatan. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva kuznet “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan.

Pembangunan

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna : “(a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Studi literature. Dalam melakukan pengumpulan data penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan dampak buruk kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia karena Pembangunan yang tidak Merata melalui data-data pendukung yang

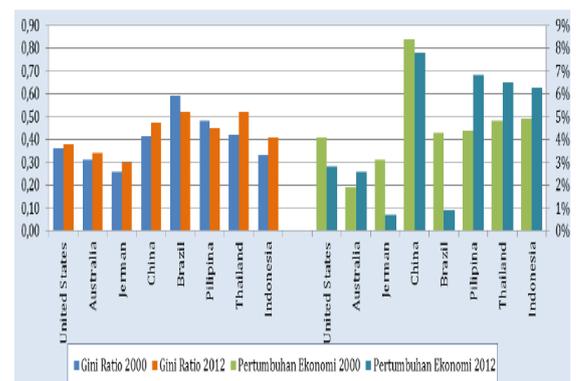
bersumber dari jurnal penelitian, buku-buku penunjang, surat kabar, dan majalah. literature review seperti yang dijelaskan Cooper dalam Creswell (2010) memiliki beberapa tujuan yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Studi literatur ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dampak buruk pembangunan tanpa pemerataan ialah kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kesenjangan Di Indonesia : Pola Umum Dan Antar Wilayah

Hal yang semakin memburuk juga sama tengah terjadi di Indonesia, selama beberapa orde terakhir pembangunan di Indonesia jelas memiliki hubungan pada desain yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dijadikan patokan keberhasilan pemerintahan orde SBY selama 10 tahun terakhir bersamaan dengan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan stabil bahkan ketika terjadi resesi global ekonomi Indonesia mampu bertahan. Di lingkaran Asia pun Indonesia pada periode itu mencapai pertumbuhan ekonomi yang termasuk tinggi. Secara teoritis sesuai dengan ajaran kaum kapitalis bahwa akumulasi kapital melalui pertumbuhan ekonomi akan memberikan rembesan kepada golongan di bawahnya, memang ada yang merembes akan tetapi sangat tidak signifikan ketika hanya tetesan air saja yang dinikmati oleh sebagian besar individu dalam masyarakat akibatnya akumulasi kapital dipastikan hanya akan terus kembali ke golongan yang paling atas. Dalam isitlah Prof. Mudrajat Kuncoro (2013) yang sering kali digunakan untuk menjelaskan fenomena ini adalah tidak ada bukti *trickle down effect* yang ada hanyalah *trickle up effect* yang artinya *benefit* hanya akan muncrat ke atas. Pembuktian tersebut dapat dilihat dari semakin tidak meratanya proses pembagian kue-kue ekonomi di Indonesia.

Grafik 1.2 Perbandingan *Gini Ratio* Dan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : Iryanti, 2014

Seperti yang terlihat pada grafik 1.2, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengarah secara gradual pada peningkatan. Hal ini dibuktikan mulai tahun 2000 ekonomi Indonesia telah tumbuh 5 persen kemudian terus tumbuh hingga menginjak angka 6 persen lebih hingga tahun 2012 akan tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut justru selaras dengan angka kesenjangan pendapatan yang dibuktikan dengan makin tingginya *gini ratio* yang telah mencapai poin 0.40 pada tahun 2012. Hal ini juga dapat dibandingkan dengan Negara-Negara lain seperti di Filipina dan Thailand yang mengalami penurunan indeks *gini* saat mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Inilah yang seharusnya terjadi, seharusnya negara yang menghasilkan PDB besar, pendapatan per kapita yang tinggi, dan distribusi pendapatan relatif merata, mempunyai koefisien *gini* yang relatif rendah. Parahnya Indonesia juga dalam kurun waktu tahun 2000-2012 mengalami peningkatan koefisien *gini* paling tinggi di Asia seperti yang terlihat di grafik 1.4. Indonesia berdasarkan tabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 10 persen mulai tahun 2000 hingga 2012 jika dihitung pertahun maka Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen per tahun, bahkan urusan kesenjangan ini Indonesia tertinggal dari Filipina dan Thailand yang terus mengalami penurunan angka kesenjangan pendapatan.

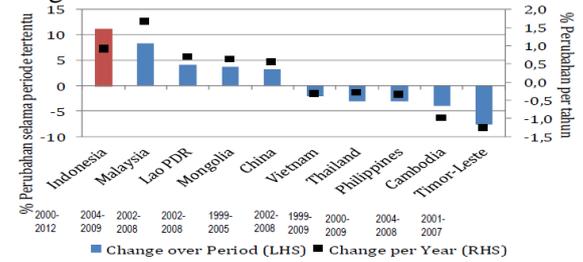
Grafik 1.3 Penurunan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesenjangan Pendapatan



Sumber : Iryanti, 2014

Sering kali kemiskinan dan kesenjangan menjadi hal yang beriringan, semakin banyak orang miskin maka dapat disimpulkan semakin tajam angka kesenjangan yang ada. Persoalan kemiskinan juga menjadi basis data yang menjadi masalah di Indonesia meskipun terjadi penurunan akan tetapi angka penurunan yang kurang signifikan, selain itu kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia juga semakin parah ketika angka kesenjangan justru semakin naik. Sesuai dengan grafik 1.3 dapat dijelaskan bahwa sejak tahun 1999 hingga 2013 terjadi penurunan angka kemiskinan terutama pasca terjadinya krisis keuangan tahun 1998, akan tetapi penurunan kemiskinan tidak diimbangi dengan semakin meratanya pendapatan. Dapat dilihat bahwa sejak tahun 2000 kesenjangan pendapatan semakin lebar dan pada akhir tahun 2013 telah melebihi angka 0.4. Hal ini membuktikan tidak terjadi distribusi pendapatan yang merata di Indonesia, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan. Selain itu berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dari pemerintah selama ini tidak dapat membantu untuk mengatasi kesenjangan yang seharusnya ketika kemiskinan dapat diturunkan maka tingkat pemerataan pendapatan juga akan terjadi di masyarakat sebab pemberian bantuan baik berupa program pemberdayaan maupun bantuan *cash transfer* seharusnya membuat masyarakat mandiri dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Apa yang terlihat sekarang sangat jelas bahwa jurang antara penduduk miskin dengan penduduk kelas atas semakin jauh sehingga masyarakat kelas bawah akan semakin terjerembab karena tidak mungkin tetesan dari atas akan segera turun kepada mereka jika *gap* diantaranya melintang sangat jauh dan dalam.

Grafik 1.4 Perubahan Koefisien Gini beberapa Negara di Asia



Sumber : World Bank, 2014

Selain itu Indonesia juga mengalami kesenjangan antar golongan, seperti analisis yang dilakukan oleh koran Tempo tentang distribusi pendapatan masyarakat Indonesia. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1. Pada golongan teratas seharusnya hanya mendapatkan sekitar 28,6 persen akan tetapi pada kenyataannya mendapatkan 38,2 persen, sedangkan parahnya golongan paling bawah yang seharusnya mendapatkan 13,2 persen dari seluruh pendapatan yang ada hanya mendapatkan 7,4 persen. Perbedaan antara golongan teratas dan golongan terbawah sangat jauh, golongan terbawah tertinggal lima kali lipat dari golongan teratas. Kesenjangan pendapatan antar golongan adalah yang paling berbahaya ketika golongan atas semakin menikmati akumulasi kapital dan golongan bawah hanya mampu mengais sedikit kapital yang didapatkan akibatnya jarang sekali terjadi mobilitas vertikal secara masif dari golongan bawah.

Tabel 1.1 Distribusi Pendapatan

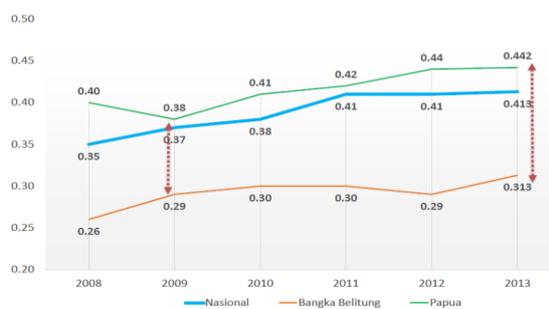
Ideal (%)	Real (%)
Teratas 28,6	38,2
Kedua 22,9	25
Ketiga 19,3	17,7
Keempat 15,9	11,6
Terbawah 13,2	7,4

Sumber : Tempo, 2014

Masalah kesenjangan di Indonesia sebenarnya juga tidak selalu berkisar pada persoalan ekonomi, banyak fakta lain yang mendukung bahwa Indonesia tengah mengalami kesenjangan multidimensional sama seperti halnya dengan kemiskinan yang tidak dapat dipahami dengan hanya faktor tunggal. Hal ini sangat berbahaya jika kesenjangan hanya dipahami oleh satu faktor

ekonomi tanpa melibatkan sendi-sendi sosial yang lain, bahkan jika para *policy maker* mengabaikan aspek struktural. Kenyataan yang ada bahwa aspek struktural yang menopang praktek ekonomi Indonesia tidak mampu mendukung sehingga pada dasarnya lemahnya struktur masyarakat dan pemerintahlah yang membebani kegiatan ekonomi yang seharusnya efisien. Menurut Bambang Sudibyo dalam Dewanta dkk (Ed). (1999) Pola ekspresi struktural dicerminkan oleh kesenjangan yang terjadi antar daerah, misal : antar propinsi,desa dan kota, timur dan barat dan lain-lain yang bersifat parsial; antar sektor yang berupa sektor modern dan tradisional, sektor industri dan pertanian dan antar sosial atau golongan. Ekspresi struktural yang salah tersebut membuat kesenjangan di banyak bagian basis produksi yang dikuasai masyarakat.

Grafik 1.5 Gap Koefisien Gini Antar Provinsi

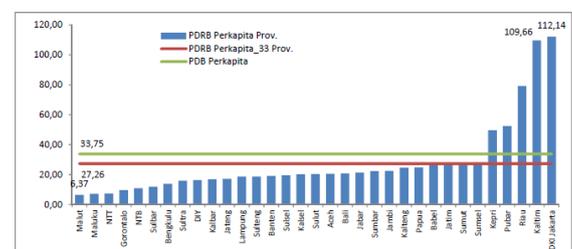


Sumber : BPS, 2013

Beberapa data dapat ditunjukkan melalui bagian ini. Grafik 1.5 menyederhanakan pengamatan bahwa sejak tahun 2009 indeks gini Indonesia secara nasional mengalami peningkatan. Dimulai dari tahun 2009 dengan 0.37, kemudian merambat naik satu poin menjadi 0.38 pada tahun 2010, meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 0.41, kemudian stagnan pada tahun 2012 pada poin yang sama seperti pada tahun 2011 yaitu 0.41 serta pada tahun 2013 melonjak menjadi titik poin yang tertinggi yaitu mencapai level 0.413. melalui grafik tersebut juga dapat dijelaskan semakin lebarnya jurang perbedaan pendapat antar provinsi yang terendah dan juga tertinggi, dalam grafik dicontohkan dengan yang terendah adalah Provinsi Bangka Belitung yang pada tahun 2009 memiliki indeks gini 0.29 dan pada akhir 2013 mencapai 0.318 sedangkan perbedaan terjadi di Provinsi Papua yang memiliki kesenjangan tertinggi di Indonesia

yaitu pada tahun 2008 mencapai 0.38 dan pada akhir 2013 mencapai angka 0.442. perbandingan yang jauh antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Papua menyerupai botol kaca gendut yang semakin akan semakin lebar jika diisi semakin ke bawah. Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh pemahaman selain mengalami kesenjangan ekonomi yang semakin buruk secara nasional, Indonesia juga mengalami kesenjangan antar wilayah dalam hal ini adalah antar daerah yang semakin senjang. Hal ini juga disepkati oleh Irman Gusman ketika masih menjabat sebagai Ketua DPD-RI. Gusman (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di Jakarta, sementara daerah-daerah lain terutama di kawasan Indonesia timur sangat tertinggal sehingga terjadi ketimpangan disertai ketidakadilan ekonomi. Dari grafik 1.6 dapat dilihat perbedaan yang sangat signifikan antara daerah atau wilayah yang memiliki sumber daya tertentu sehingga memiliki *output* yang lebih besar dari daerah lainnya, fenomena ini sangat mengganggu jika dibandingkan secara langsung misalkan DKI Jakarta dengan Maluku Utara. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki potensi minyak dan gas bumi dipastikan meninggalkan daerah lain. Daerah yang dimaksudkan antara lain Kepulauan Riau, Kutai Barat, Riau dan Kalimantan Timur. Selain itu DKI Jakarta tetap menjadi daerah dengan nilai PBDRB paling tinggi, fakta ini menunjukkan bahwa pola sentralisasi arus modal tetap terjadi di Ibukota meskipun telah terjadi desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melalui mekanisme dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Grafik 1.6 Perbandingan PDRB Perkapita Dengan Migas Antar Provinsi



Sumber : BPS, 2012

Banyak teori yang telah menjelaskan fenomena kesenjangan yang dalam konteks ini adalah kesenjangan antar wilayah di Indonesia,

misalkan dari pakar ekonomi Gunnar Myrdal. Menurut Myrdal dalam Restiatun (2009) ketimpangan pembangunan daerah selalu muncul dan cenderung semakin melebar. Fenomena yang dijelaskan oleh Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif (*Cumulative Causation*). Menurut Myrdal *backwash effect* (dampak yang merugikan) lebih besar dibanding *spread effect* (dampak yang menguntungkan). Penjelasan dari Myrdal memberikan kontribusi penting untuk memahami kesenjangan antar wilayah bahwa karakteristik daerah maju dan kurang maju memberikan jawaban ketika terjadi kesenjangan, aliran kapital dan turunannya selalu memusat sedangkan ketersediaan sumber daya murah dipastikan hanya ada di daerah yang kurang maju. Kemudian dari Armstrong dan Taylor yang menyebutkan setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ekonomi antar daerah : (1) Kemajuan teknologi yang berbeda antar daerah, (2) Pertumbuhan persediaan modal (*capital stock*) yang berbeda antar daerah, (3) Pertumbuhan angkatan kerja (*labor force*) yang berbeda antardaerah. Pendapat Armstrong dan Taylor juga memperkuat bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah tidak hanya soal kegiatan ekonomi saja akan tetapi juga terkait dengan teknologi dan angkatan kerja yang berkualitas tentunya. Pendapat lebih lengkap lagi dikemukakan oleh Williamson. Menurut Williamson kesenjangan antar daerah yang semakin membesar disebabkan oleh *pertama*, adanya migrasi tenaga kerja antar daerah yang bersifat selektif, yang pada umumnya para migran tersebut lebih terdidik dan memiliki keterampilan yang tinggi dan masih produktif. *Kedua*, adanya migrasi kapital antar daerah, adanya aglomerasi pada daerah yang relatif kaya merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. *Ketiga*, adanya pembangunan sarana publik pada daerah yang lebih padat dan potensial berakibat mendorong terjadinya ketimpangan antardaerah lebih besar. *Keempat*, kurangnya keterkaitan antar daerah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada semakin besarnya kesenjangan yang terjadi. Kemudian ditambah dari hasil studi dari Ramly (2012) memberikan kesimpulan bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi ketimpangan regional, yaitu, hanya belanja modal dan pertumbuhan yang mempengaruhi secara negatif sekaligus

signifikan terhadap ketimpangan regional. Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), tingkat pendidikan, belanja barang memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan serta ekspor berpengaruh secara positif dan tidak signifikan.

Dalam analisis ini maka dapat dilihat bahwa sejak era otonomi daerah yang bahkan hingga saat ini telah melalui berbagai perombakan perundang-undangan mulai dari UU No. 22 tahun 1999 kemudian berubah ke UU No. 32 tahun 2004 dan pada tahun 2014 ini kembali berubah pada UU No. 23 tahun 2014 ternyata belum mampu menghasilkan desentralisasi ekonomi yang adil dan signifikan ke berbagai daerah secara merata akibatnya sangat kentara antara daerah maju dengan daerah yang masih terbelakang, porsi-porsi pembangunan utama masih sangat kentara pada daerah yang kaya akan sumber daya. Hal ini sangat berbahaya sebab pasti akan terjadi kutukan sumber daya yang lambat laun akan menghancurkan daerah yang dahulu kaya akan sumber daya menjadi daerah yang tidak mampu berkembang lagi yang pada akhirnya menjadi daerah miskin. Sesuai dengan fakta di lapangan maka terdapat dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi yang mempengaruhi kesenjangan antar wilayah. Faktor ekonomi setidaknya terdiri dari dua masalah utama yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi yang bias ke golongan atas dan yang kedua adalah aglomerasi kegiatan ekonomi di daerah kaya sumber daya sedangkan faktor non-ekonomi terdiri dari tiga masalah utama yaitu pertama migrasi tenaga kerja berkualitas dari daerah miskin ke daerah kaya, kedua kesenjangan pembangunan pelayanan publik, dan ketiga kurangnya konektivitas antar daerah.

Bias Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari ulasan berbagai data sebelumnya yang menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil. Ulasan lain dari hasil Laporan Diskusi Panel Ahli Ekonom (2014) dilakukan oleh Kompas dengan mengundang beberapa ekonom untuk membahas ekonomi Indonesia. Setidaknya ada beberapa kutipan menarik yang dapat ditampilkan disini sebagai bahan perbandingan. Secara rata-rata kemakmuran meningkat 4,87 persen, tetapi distribusinya tak

merata. Pada kelompok 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kesejahteraan hanya sekitar 2 persen. Adapun pada 20 persen kelompok berpenghasilan tinggi, kenaikan kesejahteraan di atas 8 persen. Artinya, kelompok miskin menerima lebih sedikit manfaat pembangunan dibandingkan dengan kelompok tidak miskin. Ketimpangan juga terjadi antar provinsi. Delapan provinsi dengan ketimpangan di atas rata-rata nasional tahun lalu adalah Sumut, DKI Jakarta, Sulsel, Sultra, Papua Barat, Yogyakarta, Gorontalo, dan Papua. Ketimpangan tertinggi ada di Papua dengan rasio gini 0,44 dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung (0,31). Ulasan tersebut membuktikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia gagal menghadirkan pemerataan kesejahteraan. Mungkin ajaran Lewis tentang bagaimana memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan titik tumpu pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi paradigma pemerintah Indonesia. Menurut Todaro (1995) Doktrin pertumbuhan ekonomi Lewis yang pertama dan yang paling utama adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan menguntungkan bagi masyarakat bukan karena kesejahteraan ekonomi itu diperlukan untuk meningkatkan kebahagiaan dalam hidup, tetapi karena kesejahteraan ekonomi itu akan meningkatkan jumlah pilihan yang diambil oleh manusia. Padahal Lewis dengan jelas bahwa pertumbuhan ekonomi bukan untuk mengejar kesejahteraan bersama. Secara klasik juga sudah diingatkan oleh Polanyi (1944), ketika peningkatan secara luar biasa perdagangan dan produksi kebetulan disertai dengan kenaikan secara luar biasa pada tingkat penderitaan manusia. Itulah artinya bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat memastikan pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi tidak mampu menjamin adanya kesetaraan pendapatan bagi individu jika ditarik dalam skala makro suatu negara maka akan ada perbedaan pendapatan yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lain sebab masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus atau afirmatif untuk mengembangkan kemandirian perekonomiannya, fakta selama ini di Indonesia masih terlaui banyak daerah yang tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan masih menyusu kepada pemerintah pusat hanya untuk mendapatkan transfer dana yang rata-rata lucunya juga habis

untuk belanja birokrasi bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi strategis. Ini merupakan hal yang fatal yang memperlihatkan hilangnya esensi dari otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang dengan caranya sendiri akan tetapi justru daerah masih mengalami ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Permasalahan kesenjangan bukan merupakan persoalan yang sepele sudah banyak hasil studi yang menunjukkan hasil akhir pembiaran dari kesenjangan adalah merugikan masyarakat dan berujung pada konflik. Seperti hasil tulisan dari Prof. Mudrajat Kuncoro (2013) : Masalah ketimpangan ini-dalam praktik-ering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyat. Namun, yang terjadi sebaliknya, kesenjangan terjadi di mana-mana. Misalnya, di daerah yang miskin dan APBD-nya rendah, para pejabat dan kepala dinas mengendarai mobil mewah dan tinggal di perumahan mewah. Tak ketinggalan, para kontraktor sebagai mitra kerja pemda juga ikut menampilkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran di daerah, masyarakat di sekitarnya hanya bisa menjadi penonton sehingga mendorong munculnya kecemburuan sosial, kesenjangan, dan berujung pada tindak kekerasan (Kuncoro, 2013). Sudah seharusnya persoalan kesenjangan diakhiri karena mengakibatkan persoalan yang fatal di kemudian hari, sering kali kesenjangan merupakan problem utama dari konflik karena perebutan sumber daya tertentu. Menurut Kurnianto (2012) dalam menyelesaikan akar persoalan konflik, yakni masalah kesenjangan ekonomi, akan menjadi garansi negara di masa depan dalam mencegah konflik-konflik baru terjadi.

Kesenjangan antar wilayah ini pada ekstimnya menunjukkan gagalnya pembangunan suatu Negara sebab Negara yang harus menciptakan keadilan dengan pemerataan pendapatan sama sekali tidak mampu untuk merumuskan kebijakan yang tepat agar masing-masing wilayah apapun bentuknya dapat meningkatkan kemandirian

ekonominya sekaligus mensejahterakan masyarakatnya. Ketika kesenjangan semakin tinggi otomatis akan ada individu yang ada dibawah dan tidak mampu berbuat apa-apa sebab kesenjangan ekonomi merupakan variabel struktural yang sulit dirubah jika tidak ada antitesis melalui instrumen struktural pula, hal yang paling masuk akal dilakukan adalah melalui kebijakan dari pemerintah. Kesenjangan ekonomi antar wilayah juga memperlihatkan buruknya kreatifitas ekonomi di daerah yang ditambah dengan minimnya dorongan yang keras dari pemerintah pusat, dari segi kebijakan nasional maka hal ini menjadi catatan buruk di era otonomi daerah yang seharusnya mampu menciptakan daerah yang mandiri dalam segala bidang serta pemerintah pusat yang dihormati sekaligus memiliki instrumen kebijakan yang tepat dalam menata ekonomi di daerah sehingga tidak terlepas dari tujuan bersama.

Memperhatikan Kesenjangan Non-Ekonomi Dan Ekonomi Inklusif

Pada dasarnya tidak hanya variabel ekonomi saja yang secara langsung mempengaruhi kesenjangan pendapatan akan tetapi ada variabel lain yang apabila tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah akan dapat memperburuk keadaan. Ilmu ekonomi juga harus memperhatikan disiplin ilmu lain., bahkan Fletcher pada tahun 1979 menerbitkan buku yang berjudul *Economic And Socials Problems*. Menurut Raharjo (1983) buku tersebut merupakan upaya dari kalangan ekonomi untuk mencangkup masalah-masalah sosial. Jadi dapat dikatakan membahaa masalah ekonomi dipastikan juga akan membahas masalah diluar ekonomi atau non-ekonomi. Kesenjangan non-ekonomi akan memberikan suatu pandangan lain terhadap variabel ekonomi yang selama ini masih berfokus pada kapital padahal di luar tersebut masih banyak hal lain yang sebenarnya mempengaruhi masyarakat dan ekonomi sendiri sebab sebagai suatu fakta sosial ekonomi tidak mungkin mampu berdiri sendiri dan bersifat uniter. Kesenjangan non-ekonomi akan menjelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi pemerintah tidak perlu berlebih-lebihan untuk meningkatkan ekonomi secara makro melalui eksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya akan tetapi melalui investasi lain misalkan pendidikan dan kesehatan yang terbukti mampu meningkatkan

taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perkembangan masyarakat. Seperti pendapat Paul Krugman pada Whitfield (2001) : *Global, regional and national public goods are becoming more important in determining collective and individual welfare and reducing inequality. Increasing instability of market economies, the threat of financial crises, 'the return of depression economics'*.

Variabel yang dimaksudkan termasuk dalam kategori non-ekonomi yang dalam hal ini adalah pelayanan publik yang dipastikan juga mengalami kesenjangan. Hal ini penting sebab pelayanan publik memiliki dampak yang tidak kalah besar dengan dampak ekonomi. Kombinasi keduanya secara simultan akan mengarahkan masyarakat ke kesejahteraan yang lebih baik, dalam konteks Negara maka disebut dengan Negara kesejahteraan atau *welfare state*. Negara kesejahteraan sering kali disebut sebagai penawar racun dari sakitnya liberalisasi perekonomian. Hal ini menjadi konsep penting karena hampir tidak mungkin untuk menghindari arus kapitalisme dunia dan globalisasi ekonomi, yang perlu dipersiapkan adalah aspek struktural agar kesenjangan ekonomi tidak semakin menganga terutama bagaimana melindungi dan memproteksi masyarakat melalui pelayanan publik sehingga masyarakat tetap dapat berkembang meskipun dihipit oleh akumulasi kapital yang terkadang tidak adil maka pelayanan publik dapat menjadi instrumen dalam menciptakan keadilan. Pendapat Dexter Whitfield dalam buku *public service or corporate welfare* (2001) kembali mengingatkan kita tentang fungsi negara untuk melindungi dan meregulasi masyarakat “*States have also acted to regulate monopolies and afford consumer protection in the provision of goods and services.*”

Kesenjangan pelayanan publik di Indonesia dapat dilihat dari hasil studi dari *World Bank* pada Desember 2014 menunjukkan jarak rata-rata menuju fasilitas kesehatan di Indonesia memang hanya 5 km pada tahun 2011, akan tetapi di provinsi seperti Papua Barat, Papua, dan Maluku jarak rata-rata lebih dari 30 km. Lebih dari 40 persen masyarakat di Sulawesi Barat, Maluku dan Kalimantan Barat membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk mencapai rumah sakit umum, dibandingkan dengan 18 persen secara nasional. Hanya 2 persen dari populasi membutuhkan waktu lebih

dari satu jam untuk mencapai Puskesmas, tetapi jumlah tersebut jauh lebih tinggi di Papua (28 persen), Nusa Tenggara Timur (11 persen), dan Kalimantan Barat (11 persen). Parahnya di tingkat layanan yang seharusnya paling dekat menjangkau masyarakat tidak ada satupun Puskesmas di Indonesia yang dilaporkan memiliki keseluruhan 38 indikator tracer (standar tindakan) untuk kesiapan pelayanan umum. Pembangunan deawsa ini tidak hanya perlu untuk bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja seperti yang telah dijealaskan diatas banyak terjadi bias dan distorsi akibat fokus kebijakan makro ekonomi yang menitikberatkan pada arus dan akumulasi kapital. Kesenjangan pelayanan publik juga harus diperhatikan karena mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat jika diabaikan setinggi apapun derajat ekonomi menjadi tidak berguna karena tidak akan berjalan efisien jika tidak disokong oleh sistem pelayanan publik yang baik.

Konsep ekonomi yang dikembangkan harus tegas ketika dihadapkan pada kenyataan dunia yang semakin liberal dan Indonesia sendiri juga pasti terpengaruh meskipun Indonesia memiliki nilai-nilai tersendiri yang seharusnya patut menjadi pondasi akan tetapi selama ini nilai-nilai tersebut rontok oleh dorongan modal yang luar biasa, bahkan berbagai aturan perundangan-undangan pun dibentuk untuk mendukung masuknya modal asing dengan deras. Akibat dari deregulasi dan privatisasi tersebut sumberdaya manusia Indonesia dikuasai oleh pasar, dan bukan oleh negara bangsa ini (Susan, 2012). Ekonomi yang dikembangkan harus berasas pemerataan dan bersifat strategis sebagai visi kedepan yang tidak mudah jatuh karena arus globalisasi. Ekonomi yang merata atau anti eksklusif harus menjadi perhatian pemerintah. Sesuai dengan fakta bahwa usaha dan industri besar yang hanya berjumlah 1% dari total usaha menjadi penguasa sementara itu sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang justru menguasai masyarakat berjumlah 99% tidak mendapatkan perhatian lebih. Padahal ekonom senior Sri Edi Swasono dalam Oesman dan Alfian (1991) menyatakan bahwa jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa kebijaksanaan ekonomi yang memacu pertumbuhan ekonomi jika tidak kita waspadai malahan dapat mengarahkan kepada restrukturisasi yang berlawanan arah dengan cita-cita demokrasi ekonomi (pemerataan). Ekonomi Indonesia

harus menjadi ekonomi yang inklusif bagi masyarakat terutama golongan bawah. *Delivering economic, social, and territorial cohesion is at the heart of Europe 2020 strategy and constitutes a key theme of 'inclusive growth'.* Therefore, regional development and cohesion policies have to fulfill the task of both fostering a gradual convergence in per capita income, on one hand, as well as achieving convergence in social welfare, on the other. Nonetheless, economic convergence does not necessarily imply social convergence, and vice versa menurut Rodri'guez-Pose & & Tselios (2015). Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa pertumbuhan yang inklusif harus berisi kohesi atau kerekatan ekonomi, sosial dan wilayah yang oleh karena itu harus ada kovergensi pendapatan atau dalam bahasa sederhananya adalah pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sosial.

Belajar Dari Tiongkok

Tingginya angka kesenjangan ekonomi antar wilayah sebenarnya merupakan fenomena yang juga menjadi *trend* di dunia dimana tidak semua daerah di dalam lingkup Negara mampu meningkatkan kinerja ekonomi secara optimal akan tetapi hal tersebut merupakan catatan buruk bagi fokus pertumbuhan ekonomi suatu negara yang nyata-nyata tidak mampu memeratakan kesejahteraan apalagi menuju *harmony of interest* dan *full employment* seperti apa yang dikatakan oleh Adam Smith dan David Ricardo sebagai inisiator ekonomi klasik. Contoh menarik dapat diambil dari pengalaman Tiongkok dalam meng-*handle* kesenjangan antar wilayah di negeri mereka, ini menjadi menarik ketika Tiongkok berhasil memisahkan politik dan ekonomi secara berbeda dan bertolak belakang akan tetapi justru menjadikan kinerja ekonomi mereka sekarang menjadi salah satu yang terbaik di dunia, meskipun dengan perjuangan yang berdarah-darah akan tetapi tujuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perekonomian mampu terwujud.

Pada awalnya Tiongkok memang sadar bahwa ketika melepas perekonomian ke pasar maka dipastikan akan ada pihak yang kalah dan menang sehingga menimbulkan kesenjangan oleh kerena itu Tiongkok merespon adanya kesenjangan tersebut dengan kebijakan tertentu sehingga dampak

kesenjangan dapat diredakan. Wilayah di Tiongkok dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bagian pusat, barat dan timur yang masing-masing ciri khas. Misalkan bagian pusat ditandai dengan adanya Shanghai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan dikenal dengan daerah yang mampu memiliki pertumbuhan serta *output* yang tinggi dibandingkan daerah lain. Sedangkan daerah timur tidak memiliki sumber daya alam sama sekali yang dapat dieksploitasi. Menurut Wan (2008), beberapa studi menunjukkan ada beberapa hal yang menyebabkan adanya kesenjangan yang terjadi pada daerah-daerah di Tiongkok membutuhkan kapital yang besar untuk meningkatkan perekonomian serta eksploitasi sumber daya alam akan tetapi tidak disertai dengan tenaga kerja yang memadai.

Melalui hasil kesenjangan tersebut maka Tiongkok pada dasarnya melakukan strategi setiap wilayah antar daerah/provinsi melakukan alokasi investasi tambahan baru dan melakukan restrukturisasi industri yang ada sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing wilayahnya. Dengan demikian maka kesenjangan wilayah dapat dipersempit seiring dengan pertumbuhan yang dinamis, jadi antar wilayah saling berkaitan dan membutuhkan.

Melalui penjelasan tersebut dapat ditemukan pembelajaran bahwa perkembangan ekonomi harus didasarkan pada keunggulan komparatif di daerah masing-masing serta meningkatkan kemampuan para pekerja.

KESIMPULAN

Melalui analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan dampak buruk dalam pembangunan ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus berfikir panjang dan strategis dalam menghadapi masalah kesenjangan karena telah menyangkut aspek struktural sehingga tidaklah mudah untuk dirubah. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah harus ada program ataupun *masterplan* baru untuk mendukung atau mengembangkan pola pembangunan di Indonesia. *Masterplan* yang baru harus berisi tentang pembangunan ekonomi di Indonesia terutama perencanaan yang matang tentang ekonomi yang inklusif yang mampu pemeratakan pendapatan. Selama ini ekonomi informal yang menguasai perekonomian masyarakat Indonesia dianggap belum terlalu

penting untuk menjadi sebuah perencanaan yang elit secara politis dan canggih secara teknoratis buktinya adalah sedikit dan sangat kecil sekali investasi yang disediakan pemerintah untuk sektor tersebut. Selain itu untuk menjamin keberlangsungan masyarakat dengan ekonomi yang sehat dan berkualitas maka perlu memperhatikan faktor non-ekonomi yang dalam hal ini adalah pelayanan publik yang berkualitas dan merata terutama pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pelayanan publik memiliki dampak penting sebab ketika individu atau daerah gagal bersaing dalam kancas persaingan pasar bebas maka setidaknya kelangsungan hidupnya masih terjaga karena telah dilindungi oleh pemerintah melalui instrumen pelayanan publik. Dua rekomendasi tersebut harus diwujudkan melalui program baru dan merupakan ide yang bagus dan dapat dijadikan masukan untuk program baru yaitu tentang ide pembagian koridor ekonomi daerah serta konektivitas daerah melalui pembangunan infrastruktur akan tetapi hal tersebut juga harus dikombinasikan dengan paradigma ekonomi yang inklusif serta pembangunan dan pemerataan pelayanan publik seperti apa yang telah diungkapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, Robert E, 1986. *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*, terjemahan St.Dianjung. PT Bina Aksara, Jakarta.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewanta, Awan Setya dkk., (Ed). 1999. *Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia*. Aditya Media : Yogyakarta.
- Gusman, Irman. 2013, *Kesenjangan Ekonomi*. Opini Harian Suara Karya 15 Juli 2013.
- Iryanti, Rahma. 2014, *Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia: Permasalahan dan Tantangan*. Bappenas : Jakarta.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kuncoro, Murdrajat. 2006. "Ekonomi Pembangunan", Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Kuncoro, Mudrajat. 2013, *Mengurangi Ketimpangan*. Opini harian Kompas 2 Maret 2013.
- Kurnianto, Fajar. 2012, Konflik, *Kesenjangan Ekonomi Dan Rapuhnya Negara*. Opini Harian Sinar Harapan 5 November 2012.
- Kuznets, Simon. 1955. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*. Volume XLV
- Laporan Diskusi Panel Ahli Ekonomi. 2014, *Kemakmuran Naik, Kesenjangan Menajam*. Harian Kompas 13 Juni 2014.
- Oesman Oetoyo & Alfian (Ed). 1991, *Demokrasi Ekonomi : Keterkaitan Usaha Partisipatif VS Konsentrasi Ekonomi, Pancasila Sebagai Ideologi*. BP-7 Pusat : Jakarta.
- Piketty, Thomas. 2014, *Capital In the Twenty First Century*. Belknap Press : Cambridge.
- Polanyi, Karl. 1944, *Transformasi Besar : Asal-Usul Politik Dan Ekonomi Zaman Sekarang*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Rahardjo, M. Dawam. 1983, *Esai-Esai Ekonomi Politik*. LP3ES : Jakarta.
- Ramly, Fahrudin. 2012, Determinan Ketimpangan Regional Di Indonesia Tahun 2000-2008, *Jurnal Assets*. Vol. 2(1).
- Restiatun. 2009, Identifikasi Sektor Unggulan Dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. Vol.10(11).
- Rodri'guez-Pose, Andre's & Tselios, Vassilis. 2015, Toward Inclusive Growth: Is There Regional Convergence in Social Welfare ?, *International Regional Science Review*. Vol. 38(1).
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Stiglitz, Joshep E. 2002 *Globalization and Its Discontent*, New York : Norton.
- Sukirno, Sadono, 2002. *Makro Ekonomi Modern*, P.T.Rajawali Grafindo Persada : Jakarta.
- Susan, Novri. 2012, *Negara Gagal Mengelola Konflik : Demokrasi Dan Tata Kelola Konflik Di Indonesia*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. 1995, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang : Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip Masalah Dan Kebijakan Pembangunan*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Wan, Guangha (Ed). 2008, *Inequality And Growth In Modern China*. Oxford University Press : New York.
- Whitfield, Dexter. 2001, *Public Service Or Corporate Welfare*. Pluto Press : London.
- World Bank. 2014, *Membawa Perubahan, Indonesia Economic Quartely*.